



Judul : Permintaan kalangan senayan kepada Bank Himbara, dana Rp200 triliun harus difokuskan ke sektor riil
Tanggal : Jumat, 19 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Permintaan Kalangan Senayan Kepada Bank Himbara

Dana Rp 200 Triliun Harus Difokuskan Ke Sektor Riil

Pemerintah secara resmi memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 200 triliun dari rekening Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Senayan meminta, dana Pemerintah ini segera disalurkan ke sektor riil melalui kredit perbankan.

ANGGOTA Komisi VI DPR Firnando Ganinduto mengatakan, dana tersebut harus diarahkan ke sektor-sektor dengan *multiplier effect* tinggi, yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian, pangan, perumahan rakyat, dan sanitasi. "Kita tidak mau dana Rp 200 triliun ini berhenti di perbankan atau dipakai beli Surat Berharga Negara (SBN)," tegasnya.

Menurut Firnando, uang ini mesti benar-benar masuk ke sektor produktif, menciptakan lapangan kerja, memperkuat pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyaluran terbaik atau kanal utama yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan KUR, Himbara bisa memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dengan bunga rendah, syarat mudah, dan proses cepat.

Diketahui, BRI hingga Agustus 2025 sudah menyalurkan Rp 114,28 triliun KUR ke 2,5

juta debitur UMKM. Pemerintah juga menargetkan porsi KUR ke pertanian makin besar agar pembiayaan bibit, pupuk, cold storage, hingga alat pasca panen bisa ter-cover optimal.

Firnando melanjutkan, KUR Perumahan Rakyat dan sanitasi perlu dipercepat agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapat rumah layak huni dan fasilitas sanitasi memadai. "Monitoring real time itu kunci-nya," tandas politikus Golkar ini.

Pemerintah dan DPR harus memantau langsung berapa dana yang benar-benar masuk ke UMKM, pertanian, dan perumahan rakyat, serta memastikan kualitas kredit tetap terjaga. "Dengan strategi ini, pemindahan SAL ke Himbara akan menjadi pengungkit ekonomi rakyat, bukan sekadar tambahan likuiditas di sektor keuangan," harap dia.

Sementara, Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhus memastikan, pemindahan SAL sebesar Rp 200 triliun dari re-



Firnando Ganinduto

kening BI ke Himbara sudah sesuai aturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Dalam UU Perbendaharaan Negara membolehkan Pemerintah menempatkan dana yang terkait dengan APBN," kata Misbakhus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Misbakhus menambahkan,

dalam UU APBN 2025 juga terdapat pasal yang membolehkan Pemerintah menempatkan SAL dari rekening di BI ke bank umum yang menjadi mitra Pemerintah. "Kalau ada yang mempertanyakan efektivitas SAL, itu bagian dari pemanfaatan publik yang bisa menjadi penguatan," ujar politikus Golkar ini.

Selain itu, Misbakhus berharap penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu membawa harapan baru bagi perekonomian Indonesia. Meski sebelumnya publik sempat ragu dengan pergantian dari Sri Mulyani, tapi pasar menunjukkan respon positif. "Belum satu minggu, harga saham mencapai titik tertinggi di atas 8.000, rupiah stabil, dan surat utang negara juga tidak menimbulkan gejolak," sebut dia.

Misbakhus menegaskan, posisi Menkeu bukan hanya soal fiskal, tetapi juga peran penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kami yakin Purbaya akan menghadirkan ide-ide baru yang sejalan dengan arah besar ekonomi Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya. ■ **TIF**

desain baru bagi kebijakan fiskal, terutama dalam mendukung target Prabowo mewujudkan APBN berdaulat dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

"Yang kita tunggu adalah apa tawaran baru dari Pak Purbaya. Bagaimana desain fiskal Indonesia ke depan agar bisa mewujudkan visi presiden, termasuk wacana APBN zero deficit," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai tantangan lain yang harus dijawab Purbaya adalah tingginya imbal hasil surat utang Indonesia dibanding negara ASEAN lain, yang masih berada di kisaran 6-7 persen. Padahal kepercayaan internasional terhadap Presiden Prabowo sangat kuat. "Ini perlu dijawab dengan kebijakan fiskal yang lebih strategis," tandasnya.

Misbakhus menegaskan, posisi Menkeu bukan hanya soal fiskal, tetapi juga peran penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kami yakin Purbaya akan menghadirkan ide-ide baru yang sejalan dengan arah besar ekonomi Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya. ■ **TIF**